



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 303 TAHUN 2023

**TENTANG
SATUAN TUGAS/RELAWAN
ANTI NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG SATUAN TUGAS/RELAWAN ANTI NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. sebagai penyuluh, menyebarluaskan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
 2. sebagai inisiator, menginisiasi atau memprakarsai tentang program dan kegiatan P4GN;
 3. sebagai fasilitator, memberikan bantuan dalam memperlancar program P4GN; dan
 4. sebagai penghubung antar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2023
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG SATUAN TUGAS/RELAWAN ANTI
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 303 TAHUN 2023

TANGGAL : 24 AGUSTUS 2023

SATUAN TUGAS/RELAWAN
ANTI NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim		Nama	Jabatan/Unit Organisasi
1.	Pengarah	:	Hendrar Prihadi	Kepala LKPP
2.	Ketua Tim	:	Sarah Sadiqa	Plt. Sekretaris Utama
3.	Wakil Ketua Tim	:	1. Iwan Herniwan	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
			2. Suharti	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
4.	Koordinator	:	1. Edi Kristiyanto	Biro Perencanaan dan Keuangan
			2. Ria Agustina Nasution	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
5.	Wakil Koordinator	:	Resa Anggriani	Biro Perencanaan dan Keuangan

No	Kedudukan dalam Tim		Nama	Jabatan/Unit Organisasi
6.	Sekretaris	:	Milania Pradani	Biro Perencanaan dan Keuangan
7.	Anggota	:	1. Budi Setyo Nugroho	Biro Perencanaan dan Keuangan
			2. Meisiska	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
			3. Hamzah Abdul Majid	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
			4. Fenita Enggraini	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Umum
			5. Lingga Sakti	Direktorat Pengembangan dan Kebijakan Pengembangan Khusus
			6. Nanda Faridah	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
			7. Astri Widya Sartika	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan
			8. Niken Mustikarini	Direktorat Sistem Pengadaan Digital

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan/Unit Organisasi
		9. Moses Alfredo Samodara	Direktorat Pasar Digital Pengadaan
		10. Fika Dautar Adika Putra	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
		11. I Nyoman Aditya Wicaksana	Direktorat Sertifikasi Profesi
		12. Andi Putri Fathania Nur Ranti Faisal	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		13. Fairuz Nawfal Hamid	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
		14. Moch. Ilham Riswanda	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
		15. Winny Adlina Pratomo	Pusat Pelatihan SDM Pengadaan Barang/Jasa
		16. Rahmah Febrina	Inspektorat
		17. Rinatri Rahmayanti	Pusat Data dan Informasi

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI